

OPTIMALISASI PERAN MEDIA DALAM PEMBERITAAN KASUS KORUPSI DI INDONESIA

(Optimization of The Role of News of Corruption in Indonesia)

Chontina Siahaan, Mompang L. Panggabean

Prodi Ilmu Komunikasi Fisipol dan Prodi Magister Ilmu Hukum

Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Jl. Mayjen Sutoyo No. 2 Cawang, Jakarta-13630;

Jl. Diponegoro 82-86 Jakarta-10430

Hp: 08128194720; 085311117890

chontinasiahaan58@gmail.com; mompanggabean@yahoo.com

ABSTRACT

The mass media reports about the arrest of suspected corruptors almost daily. They presented state officials and turned them into media commodities to gain profits through advertising and to obtain ratings. The rise of corruption cases raised by the media shows that the anti-corruption system has not been able to prevent the perpetrators of corruption. It is questionable to optimize the anti-corruption policy. It seems that there is no fear of the threat of punishment. Criminal threats against corruptors have not been optimal in achieving the goal of punishment, and corruption is even more rampant. The problem examined is the role of the media in reporting the optimization of the anti-corruption system in Indonesia. The purpose of this study is to criticize and explore the optimization of the anti-corruption system in Indonesia from the aspects of communication of law and politics of criminal law. This study uses the normative legal research method of the normwissenschaft which refers to the ius constituent with descriptive research specifications based on a critical paradigm. This research uses qualitative method. The results showed that the anti-corruption system was not optimal in preventing and eradicating corruption from the legal system theory. There was no integration between the legal substance, legal structure, and legal culture towards corruption through material criminal law, formal criminal law, and criminal implementation law. Therefore, it is recommended the use of criminal law and political communication to improve the optimal anti-corruption system in Indonesia

Keywords: *optimization; legal communication; penal policy.*

ABSTRAK

Pemberitaan media massa tentang penangkapan terduga koruptor hampir setiap hari menampilkan pejabat negara dan menjadikannya komoditas media untuk memperoleh untung melalui iklan dan perolehan rating. Maraknya kasus korupsi yang diangkat oleh media menunjukkan bahwa sistem antikorupsi belum dapat mencegah pelaku korupsi sehingga patut dipertanyakan optimalisasi sistem

PROSIDING

Konferensi Ilmiah

Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan Hak Asasi Manusia

“PEMIKIRAN KRITIS DAN STRATEGI PEMBAHARUAN HUKUM”

JILID LENGKAP

Jakarta, 29 Oktober 2019



BALITBANGKUMHAM Press

<i>(Effectiveness of Regional Autonomy Electronic-Based on Prevention Measures Criminal Corruption)</i>	
Rahmat Saputra	279
EVALUASI "GETTING ZERO TO HALINAR" DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I CIPINANG JAKARTA	
<i>(Evaluation Getting Zero to Halinar in The Correctional Institutions of Cipinang Jakarta)</i>	
Indra Jaya Ali	301
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN PENGETAHUAN SEBAGAI PENGEMBANGAN ORGANISASI PEMBELAJAR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	
<i>(Implementation of Knowledge Management as The Development of Learning Organizations in The Ministry of Law and Human Rights)</i>	
Yuliana Primawardani	319
PENGARUH KOMUNIKASI INTERPERSONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN TERHADAP KEBERHASILAN DIVERSI DAN Keadilan RESTORATIF DALAM PENANGANAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM STUDI PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I BANDUNG	341
<i>(The Effect of Interpersonal Communication of Community Considerations to Success of Diversibility and Restorative Justice in Handling Children Facing the Law Study at Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung)</i>	
Ali Muhammad; Umar Anwar; Bobby Briando	341
STRATEGI PENINGKATAN KOMPETENSI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DI INDONESIA BERDASARKAN METODE ANALISIS SWOT	
<i>(Competency Development Strategy of Indonesian Probation Officer Based on SWOT Analysis Method)</i>	
Dannissa Rahmadiyah, Fitra Wityanto, Galih Yantho, Mirna Dewi	361
DUPLIKASI KEWENANGAN BNPT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LAPAS KHUSUS TERORIS SENTUL	
<i>(Duplicated Authority of BNPT in Terrorist Prisoners Establishment in Sentul Prison)</i>	
Umar Faruq Mahmud	375
PENINGKATAN STANDAR MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PEMASYARAKATAN MENGGUNAKAN KONSEP CORPORATE UNIVERSITY DI POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN	
<i>(Increasing Quality Standards and Development of Human Resources Using Corporate University Concepts in Correctional Polytechnic)</i>	
Dimas Dhanang Sutawijaya, Yudha Cahyo Prabowo, Nur Ria Tri Jayanti	395
OPTIMALISASI STRATEGI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI PANCASILA KETUHANAN YANG MAHA ESA1	
Mukhlisin; Noor Alis Setiyadi	411

DAFTAR ISI

Susunan Panitia Konferensi Ilmiah Balitbang Hukum dan HAM.....	v
Editor dan <i>Reviewer</i> Konferensi Ilmiah Balitbang Hukum dan HAM.....	vi
Sambutan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	vii
Kata Pengantar Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum	ix
<i>Keynote Speech</i> Menteri Hukum dan HAM R.I	xv
 OPTIMALISASI PERAN MEDIA DALAM PEMBERITAAN KASUS KORUPSI DI INDONESIA	
<i>(Optimization of The Role of News of Corruption in Indonesia)</i>	
Chontina Siahaan, Mompang L. Panggabean	1
 REVITALISASI RUPBASAN DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET SITAAN HASIL TINDAK KORUPSI	
<i>(Revitalization of Rupbasan In the Optimization of Asset Management of Corruption Following Results)</i>	
Antok Kurniyawan, Yola Nur Hasanah.....	21
 KONSTRUKSI UNSUR KESALAHAN PADA PEMBERANTASAN KORUPSI MENUJU SISTEM ANTI KORUPSI YANG BERKEADILAN	
<i>(Intentionally Element Construction in the Corruption Combating Towards a Justice of Anticorruption Policies)</i>	
Elstonsius Banjo	39
 PENGEMBANGAN KUALIFIKASI PEMOHON PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI DI MAHKAMAH KONSTITUSI	
<i>(Progress of Petitioner's Qualification on Legislation's Examination About Corruption on the Constitutional Court)</i>	
Kahfi Adlan Hafiz	61
 MENAKAR KOMPABILITAS TRANSPLANTASI OMNIBUS LAW DALAM KONTEKS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SISTEM HUKUM INDONESIA	
<i>(Measuring the Compliance of Omnibus Law Transplant in the Context of Legislation with the Indonesian Legal System)</i>	
Sarah Safira Aulianisa.....	79
 OPTIMALISASI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI	
<i>(Optimization of Corruption Prevention and Action)</i>	
Aras Firdaus, Rudy Hendra Pakpahan	91
 URGensi PENATAAN REGULASI DALAM RANGKA MENJAMIN SUPREMASI HUKUM	
<i>(Regulatory Arrangement Ensuring the Supremacy of the Law)</i>	
Sudjana	107

Koruptor menempuh berbagai cara untuk menyelamatkan diri dari jeratan hukum sebagai upaya menghilangkan jejak langkah dan aksinya mencuri kekayaan negara guna kepentingan diri sendiri dan/atau kelompoknya agar tidak terjamah penegak hukum. Sebagaimana diketahui, korupsi bukanlah gejala yang baru timbul dalam masyarakat modern, sebab pada jaman dahulu seperti masa pemerintahan Firaun Horembeb di Mesir dijatuhkan pidana mati bagi pelaku *mark-up* bahan bangunan Sphinx yang sedang dibangun. Oleh karena itu, tepatlah ucapan J. E. Sahetapy, yang mengatakan bahwa yang baru bukanlah *modus* atau tindakannya, melainkan kemasannya, karena pelbagai nama, makna dan ruang lingkup apapun yang hendak diberikan bertalian dengan kejahatan itu, itu bukanlah barang baru, yang baru adalah kemasan, bentuk, serta perwujudannya. Sifatnya boleh dikatakan secara mendasar adalah sama. Bahkan, dampaknya yang mencemaskan dan dirasakan merugikan masyarakat sudah dikenal sejak jaman dahulu.² Bahkan *modus operandi* korupsi dari hari ke hari semakin halus dan canggih. Karena itu tidak berlebihan jika Albert Camus

mengatakan bahwa kemarin penjahat diadili, besok dia akan mendikte hukum.³ Selama kasus korupsi masih merupakan berita, maka media akan meliputnya sesuai keinginan media. Namun jika korupsi sudah diungkap ke permukaan dan menjadi tanggung jawab penegak hukum muncul pertanyaan seperti: bagaimana penanganan para koruptor saat mereka dipidana dan mengapa terpidana korupsi leluasa menonton pertandingan sepakbola di luar negeri atau *shopping* di *mall*? Bagaimana pengawasan atas terpidana korupsi sehingga bebas berbuat demikian? Apakah penegak hukum juga korupsi? Timbul kesan bahwa pengawasan dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tidak optimal dilakukan sehingga antara penjatuan pidana dengan penerapan pidana tidak sinkron.

Acapkali pemberitaan tentang pejabat negara yang korupsi lebih gencar mengingat mereka adalah tokoh atau figur publik sehingga menarik untuk diberitakan. Bagi media elektronik utamanya televisi, pemberitaan tentang pejabat adalah berita "seksi" dan dengan ulasan yang sedemikian rupa, selain memunculkan beragam opini publik juga menaikkan rating media yang berdampak pada

2 J. E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi* (Bandung: Eresco, 1991), 1, 4.

3 Binoto Nadapdap, *Korupsi Belum Ada Matinya* (Jakarta: Permata Aksara, 2014).

pandangan ini berbeda dengan pandangan yang melihat korupsi sebagai suatu anomali, meskipun dalam perspektif Kriminologi konflik, dapat dikatakan bahwa semakin besar kekuasaan sekelompok orang, semakin kecil kemungkinan menjadikan perbuatan buruk mereka sebagai kejahatan.⁵

Pemberitaan media elektronik tentang pejabat publik yang menjadi pelaku korupsi yang dapat membelokkan atau melemahkan proses hukum yang membawa dampak yang memprihatinkan ketika masyarakat terjebak pada situasi menerima kenyataan sosial yang dikonstruksikan (*social constructed*) sebagai suatu kebenaran. "Konstruksi sosial tersebut membuat masyarakat tidak lagi dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Masyarakat hanya menerima konsep-konsep tentang kebenaran dan keadilan menurut apa yang disajikan oleh media. Mengiyakan begitu saja apa yang diucapkan dan dikumandangkan oleh media, membuat masyarakat

menjadi korban (*society as a victim*) dari suatu pemberitaan yang direkayasa.

Mengapa masih banyak pejabat negara yang melakukan korupsi akibat tidak dipatuhinya hukum dan sanksi hukum tidak mencapai tujuan pemidanaan? Apa yang membuat para koruptor merajalela dalam melakukan korupsi padahal ada sejumlah aturan hukum yang telah mengatur sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi? Mengapa penerapan aturan tentang korupsi belum optimal? Dari berbagai pertanyaan tersebut, permasalahan utama dalam penulisan ini adalah bagaimanakah optimalisasi sistem antikorupsi dalam perspektif komunikasi hukum dan politik hukum pidana? Tujuannya ialah mengkritisi dan menggali optimalisasi sistem antikorupsi di Indonesia dari aspek komunikasi hukum dan politik hukum pidana.

Bertalian dengan muatan komunikasi hukum, ada beberapa penelitian tentang media yang dapat dirujuk, misalnya penelitian Setio Budi (2003) menyatakan perkembangan media televisi swasta di Indonesia, dalam interaksi kepentingan antara negara, pasar dan publik periode 1999-2002 sebagai kurun transmisi politik Indonesia menuju ke demokratisasi. Penelitian Agung Mahyudin (2009) menyatakan bahwa berita yang tersiar

(Yogyakarta: FH UGM-Kejati DIY-Dep. Keh. RI, 11 September 1999), 5.

5 Howard Becker, *Outsiders* (London: Free Press, 1973), 9 et seq.

6 *Vide*: Peter Berger and Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge* (New York: Doubleday, Garden City, 1966).

lagi merupakan ranah media sehingga pemberitaan pada ranah penyelesaian masalah justru kurang disajikan kepada masyarakat. Analisis yang dilakukan diharapkan memberi segenggam harapan untuk mengoptimalkan sistem antikorupsi di Indonesia melalui substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum terhadap hukum pidana substansial, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana tentang tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif¹⁰ berupa studi terhadap isi atau nilai dari hukum yang ada dalam masyarakat berupa *normwissenschaft/sollenwissenschaft* yang dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai nilai, kaidah, norma, dogma, asas, peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.¹¹ Melalui metode normatif dalam arti luas efek sosial pembentukan norma (hukum) termasuk latar belakang

kemasyarakatan¹² dapat digali lebih jauh

Spesifikasi penelitian deskriptif, yang berisi gambaran tentang latar pengamatan, orang, tindakan dan pembicaraan.¹³ Sedangkan paradigma yang digunakan adalah paradigma kritis dari Habermas sebagai suatu metodologi yang ditegakkan di dalam ketegangan dialektis antara filsafat dan ilmu pengetahuan.¹⁴ Asumsi paradigma kritis yaitu ada

- 10 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali, 2010), 14-15; Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 11-23.
- 11 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 45.

- 12 Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), 5, 9. Menurut Sudarto, metode ini bertolak dari pemahaman legalistik yang diwarnai cara berpikir secara fungsional, yaitu berpikir dalam problema (*probleemdenken*).
- 13 Bogdan, Robert C and Sari Knop Billen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods* (Boston: Allyn and Bacon, Inc., 1982), 84-89. Spesifikasi demikian memberi gambaran menyeluruh tentang optimalisasi sistem antikorupsi berdasarkan ide atau pemikiran/filosofi, nilai-nilai, kaidah, norma, dogma atau asas serta pengaturannya dalam perundang-undangan dan eksistensinya dalam masyarakat dengan cara mengeksplorasi serta mengklarifikasi objek yang diteliti, yaitu judul berita dalam media elektronik dan media cetak, judul teks dan foto yang memuat unsur komoditas terhadap koruptor secara nyata atau terang-terangan di dalam medianya. (Guba dan Lincoln, Lincoln, Yvonna S. Dan Guba, Egon G. 1985. *Naturalistic Inquiry* (London: SAGE Publications 2009), 129.
- 14 Budi Hardiman F. *Kritik Ideologi, Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), Conf. K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Inggris-Jerman* (Jakarta: Gramedia, 2002).

kapitalis melakukan akumulasi kapital. Komodifikasi adalah proses perubahan nilai fungsi (nilai guna) menjadi sebuah nilai tukar. Konten media tidak saja dalam bentuk cerita, model, kreativitas yang berada dalam program tetapi semua bentuk komoditas yang diproduksi yang selanjutnya dipasarkan kepada pengiklan untuk menghasilkan keuntungan bagi pemilik media.¹⁶ Oleh karenanya produk media menjadi komersial. Khalayak lebih tertarik kepada isu-isu yang seksi sehingga pemberitaan penyelesaian hukum tak jarang jadi terabaikan.

Apabila hal itu dikaitkan dengan pemikiran Mosco tentang komodifikasi bahwa pemanfaatan barang dan jasa dilihat dari kegunaannya, maka hal itu berlanjut pada transformasi ke dalam komoditas yang dinilai dari makna di pasar. Komodifikasi yang dilakukan oleh pihak media dapat dilihat dari bentuk komodifikasi isi (*content*), komodifikasi khalayak (*audience*) yang juga terdiri atas komodifikasi immanen (*rating*), komodifikasi pekerja (*labour*), dan komodifikasi eksternalisasi. Proses

komodifikasi dimulai dari proses produksi yang dilakukan kaum kapitalis dengan membeli tenaga kerja dan alat-alat produksi sebagai komoditas yang kemudian diinvestasikan untuk menghasilkan nilai lebih. Dalam kaitan ini, korupsi merupakan barang yang sangat laku dijual di pasar sehingga para pejabat negara yang korupsi, merupakan bahan berita yang seksi untuk diberitakan, karena punya nilai jual yang menarik perhatian masyarakat.

Dari teori kritis dapat dipahami bahwa ada tiga hal yang harus dipenuhi agar memadai dalam mengkritisi¹⁷ yaitu *pertama*, *explanatory*, yang berarti harus menjelaskan apa yang salah dan benar, yang seharusnya dan tidak seharusnya, yang wajar dan tidak wajar dari suatu realitas sosial yang ada seperti kasus korupsi. *Kedua*, *practical*, yang menjelaskan praktik-praktik maupun aktor-aktor sosial yang mampu mengubah dan mengoreksi realita yang dinilai tidak seharusnya demikian. Apakah dalam praktiknya kasus korupsi sudah dikoreksi dan dinilai sebagaimana mestinya atau malah seolah-olah dibiarkan, merupakan pertanyaan yang krusial. *Ketiga*, *normative*, terkait dua dimensi

16 Mosco Vincent. *The Political Economy of Communication* (London: SAGE Publication, 2009), 157. Teori ekonomi politik yang dicetuskan oleh Vincent Mosco memiliki tiga tahap yaitu komodifikasi, spesialisasi dan strukturasi. Komodifikasi merupakan proses transformasi hal-hal yang memiliki nilai guna menjadi produk untuk dinilai dan bisa ditukar.

17 Vide: Bohman James, *Critical Theory* dalam Edward N. Zalta (Ed) *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* 2005.

juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh sebab itu wajarlah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga dikatakan sebagai bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian *social policy* sekaligus tercakup di dalamnya *social welfare policy* dan *social defence policy*.¹⁸

Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana tidak dapat

dilepaskan dari politik hukum pada umumnya, yang merupakan:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁹

Melihat maknanya yang demikian, maka menjalankan politik hukum pidana juga berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.²⁰ Oleh karena itu, melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.

²¹ Sejalan dengan pendapat di atas,

18 Sudarto, *Op. cit.* 158, menyatakan bahwa politik kriminal ialah usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Dalam perspektif filosofis upaya perlindungan masyarakat pada hakikatnya kini semakin bergeser dari paradigma kekuasaan ke arah paradigma kedaulatan rakyat atau paradigma "akal budi."

19 Barda Nawawi Arief, *Bunga Ranipai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 27.

20 Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, *op. cit.*, hlm. 161.

21 Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Kajian terhadap Pembaharuan*

Bertolak dari teori sistem hukum Friedman, optimalisasi sistem antikorupsi yang bertolak dari komunikasi hukum yang telah disinggung di atas, juga harus dikaji dari pembaruan hukum pidana berdasarkan politik hukum pidana.

Berbicara mengenai hukum pidana substansial yang mengatur tindak pidana korupsi, dapat dikatakan bahwa meskipun hukum Indonesia pada saat ini adalah hukum kolonial yang "diberi baju" hukum nasional, telah terjadi perkembangan yang cukup maju. Awalnya di dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* yang diterjemahkan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat ketentuan tentang delik jabatan (Bab XXVIII), antara lain penggelapan (Pasal 415), pemalsuan (Pasal 416), menerima suap (Pasal 418-420), menguntungkan diri sendiri secara tidak sah (Pasal 423, 425, 435).²³ Namun oleh karena tidak memadainya ketentuan tentang tindak pidana korupsi dalam KUHP, sedangkan di kalangan militer semakin

marak penerimaan komisi oleh para pemegang kewenangan, maka Kepala Staf Angkatan Dasar selaku Penguasa Militer untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat mengeluarkan Peraturan No. PRT/PM 06/1957 tentang pemberantasan korupsi diikuti Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM 08/1957 peraturan tentang *penilikan harta-benda* dan Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM011/1957. Peraturan lain ialah Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat No. PRT/PEPERPU/013/1958 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan perbuatan korupsi pidana dan penilikan harta-benda. Dari sudut sistematikanya, peraturan yang disebut terakhir ini lebih baik dari peraturan-peraturan sebelumnya dan isinya merupakan perpaduan dari peraturan-peraturan tersebut.²⁴ Oleh sebab dirasa belum memadai karena tetap tidak ampuh untuk memberantas merajalelanya korupsi, dibuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 yang menggantikan peraturan Penguasa Perang di atas dan peraturan ini berlaku selama kurang lebih sepuluh tahun, hingga diganti oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Gejolak reformasi terhadap Orde

tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds... "Berkaitan dengan budaya hukum, dikatakannya bahwa *legal culture refers, then, to those parts of general culture-costums, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces to ward or away from the law and in particular ways.*

23 Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung, Alumni, 1986), 116-119

24 *Ibid*, 119-121

Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Salah satu persoalan yang rumit ialah apakah ketentuan Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi yang merupakan pengurangan masa menjalani pidana layak diberikan kepada terpidana korupsi mengingat tindak pidana korupsi termasuk *extra ordinary crime* atau *serious crime*. Kontroversi tentang pelaksanaan pidana berkenaan dengan remisi masih terus terjadi.

Berkenaan dengan masalah pelaksanaan pidana ini, setelah melihat kondisi yang terjadi pada lapangan hukum pidana material dan hukum pidana formal seiring pengaruh perkembangan masyarakat dan modernisasi, Sudarto menyatakan bahwa perubahan dalam sistem hukum pidana tidak cukup hanya dengan mengadakan perubahan dalam hukum pidana materiel belaka, tetapi juga hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana, beserta segala lembaga yang kerap kali disebut alat atau aparaturnya penegak hukum, yang mendukung bekerjanya sistem itu. Jadi perubahan dalam peraturan pidana harus dilihat dalam bekerjanya keseluruhan sistem hukum pidana itu.²⁵ Menurut pendapatnya, pembaharuan

hukum pidana yang menyeluruh harus meliputi pembaharuan hukum pidana materiel (substansif), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana (*Strafvollstreckungsrecht*). Ketigabidang hukum pidana itu harus bersama-sama dibaharui, sebab apabila hanya salah satu bidang yang dibaharui dan yang lain tidak, maka akan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya dan tujuan dari pembaharuan itu tidak akan tercapai sepenuhnya.

Di sinilah letak pentingnya untuk melakukan restrukturisasi yang mengandung arti "penataan kembali." Dalam kaitannya dengan menata ulang bangunan sistem hukum pidana Indonesia – termasuk di dalamnya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi – maka istilah restrukturisasi sangat dekat dengan makna "rekonstruksi," yaitu "membangun kembali" sistem hukum pidana nasional. Jadi kedua istilah itu sangat berkaitan erat dengan masalah "*law reform*" dan "*law development*," khususnya berkaitan dengan "pembaharuan/pembangunan sistem hukum pidana" ("*penal system reform/development*" atau sering disebut secara singkat dengan istilah "*penal reform*"). Dilihat dari sudut sistem hukum ("*legal system*") yang terdiri dari "*legal substance*," "*legal structure*," dan

25 Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Op. cit., hlm. 96-97.

ada *integrated penal (criminal law) system* atau *integrated criminal legal substance* dalam peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi? Dengan upaya pembaruan yang perlu dilakukan secara menyeluruh dan mendalam, dapat ditegaskan pentingnya dibangun substansi hukum tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang meliputi aspek hukum materiel, hukum formal, maupun hukum pelaksanaan pidana (termasuk penjatuhan pidana mati, pemiskinan koruptor, efektivitas perampasan aset hasil korupsi).

Bertalian dengan struktur organisasi berbagai lembaga yang melakukan fungsi dan peran penegakan hukum hingga pelaksanaan suatu putusan pidana oleh lembaga peradilan juga harus diperhatikan apakah telah ditata secara komprehensif. Penerapan hukum pelaksanaan pidana tidak dapat dilepaskan dari sistem peradilan pidana sebagai suatu rangkaian sistem yang terpadu dari "sistem kekuasaan menegakkan hukum" (atau "sistem kekuasaan kehakiman"), di mana di dalamnya terdapat beberapa subsistem struktur kelembagaan penegak hukum, yaitu (1) lembaga penyidik, (2) lembaga penuntut umum, (3) lembaga pengadilan, (4) aparat pelaksana eksekusi, dan (5) penasihat hukum.

Dua di antaranya diemban oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga tidak jarang menciptakan jurang pemisah dengan aparat penyidik dan penuntut umum. Sejalan dengan itu, pembaruan atau penataan juga perlu dilakukan terhadap institusi/lembaga, sistem manajemen/tata laksana dan mekanismenya serta sarana/prasarana pendukung dari sistem pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui sistem peradilan pidana. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus bekerja sama dengan subsistem peradilan pidana yang ada tanpa adanya konflik kepentingan dan saling mendukung. Dengan demikian sinisme yang pernah ada berupa "cicak versus buaya," takkan menjadi batu sandungan bagi upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Selaras dengan pembaruan dalam substansi hukum dan struktur hukum dalam optimalisasi sistem antikorupsi, dibutuhkan pendekatan keilmuan yang tidak sekadar meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan ilmu hukum itu sendiri, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas nilai dan produk dari proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Pendekatan keilmuan yang layak dioptimalkan secara integral meliputi: (1) pendekatan/orientasi juridis-ilmiah-

substansial, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan pemahaman yang memadai tentang substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum berdasarkan Pancasila;

2. Perlunya penegak hukum meningkatkan sosialisasi dan pencerahan tentang pembaruan sistem antikorupsi dengan memakai teori tentang komunikasi hukum dan pemahaman yang memadai tentang politik hukum pidana;
3. Perlunya media memberitakan para pejabat negara pelaku tindak pidana korupsi sesuai fakta yang ada tanpa menjadikannya komoditas media demi meraup keuntungan finansial belaka dan mencerdaskan masyarakat lewat pemahaman substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum tentang optimalisasi sistem antikorupsi dalam perspektif hukum pidana substansial, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar, Artidjo, *Korupsi Politik di Negara Modern*. Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Becker, Howard, *Outsiders*. London: Free Press, 1973.
- Berger, Peter and Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Doubleday, Garden City, 1966.,
- Bertens, K., *Filsafat Barat Kontemporer Inggris-Jerman*. Jakarta: Gramedia, 2002.
- Bogdan, Robert C and Sari Knop Billen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods* (Boston: Allyn and bacon, inc., 1982.
- Bohman, James, *Critical Theory* dalam Edward N. Zalta (Ed) *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2005.
- Faisal, Sanapiah *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2003.
- Guba, Egon G. dan Yvonna S. *Naturalistic Inquiry*. London: SAGE Publications, 2009.
- Hanitijo Soemitro, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994
- Hardiman F., Budi, *Kritik Ideologi, Me, nyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jurgen*